Prabowo Incar Suara Keluarga PKI
Berapa Jumlah Suara Keluarga PKI
Ketika Keluarga Pemberontak PRRI dan Pemberontak PKI Disatukan
HTI dan PKI Akhirnya Disatukan
AKHIRNYA PRABOWO BERKOALISI DENGAN PKI

BAGIAN I

Prabowo Satu-satunya Capres yang Terima Anak Cucu PKI

Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan menerima seluruh dukungan untuk kakaknya yang juga sekaligus Capres RI nomor urut 2, Prabowo Subianto. Ia menerima segala bentuk dukungan, termasuk dari anak - cucu simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hebat sekali! Ditengah elektabiltas Prabowo yang stagnan dibawah elektabilitas Jokowi , langkah - langkah mabuk mulai dijalankan.

Apa gak mikir dengan perasaan para Ulama yang telah memilih Prabowo melalui hasil Ijtimak? Sekali lagi , makin nyata buktinya bahwa fatwa ulama sekedar dijadikan lelucon.

Tentu kita masih ingat , saat Ustadz Alfian Tanjung mati - matian menolak bangkitnya PKI , bahkan rela memfitnah Jokowi PKI. Dan sebagai bentuk dukungan atas kerja Ustadz Alfian Tanjung , pentolan Gerindra Fadli Zon menjenguknya di tahanan.

Prabowo , Anda itu satu - satunya capres yang menerima anak cucu PKI. Apakah ini juga hasil konsultasi dengan para Ulama terlebih dahulu? Ataukah ini sebuah langkah yang sengaja dilakukan untuk menikam Ulama?

STOP!!!
Kalaupun Prabowo mau menerima anak cucu PKI sebagai barisan pendukungnya, jangan pernah libatkan Ulama lagi !!!

STOP!!!
Jangan sampai nanti timbul kesan bahwa Ijtimak Ulama merekomendasikan Capres yang meminta dukungan anak cucu PKI

BAGIAN II

Berapa Jumlah Suara Keluarga PKI

Bagaimanapun, mereka, orang-orang yang dilabeli keluarga eks anggota dan kader Partai Komunis Indonesia (PKI) itu tetaplah orang Indonesia. Mereka harus diperlakukan sama dengan warga negara lain. Mereka memiliki hak hidup di negeri ini, mendapat perlakuan sama di muka hukum, termasuk memiliki hak-hak politik seperti warga negara Indonesia lainnya.

Sejak terjadi genosida besar-besaran pada 1965, disusul pembubaran PKI pada 1966 oleh Presiden Soeharto, PKI memang sudah tidak ada lagi. Bahkan agaknya mustahil partai itu hidup lagi mengingat ideologi Marxismenya juga dinyatakan 'terlarang'. Namun demikian, mengingat partai ini pernah menjadi salah satu partai kuat pada 1960-an dengan jumlah keanggotaan mencapai lebih dari tiga juta orang, tentu jumlah keluarga eks anggota dan kader mereka tidak sedikit saat ini.

Mereka sudah melebur dengan masyarakat pada umumnya. Ada yang sudah bekerja di pabrik-pabrik, jadi pengusaha, jadi pegawai negeri sipil, jadi dokter, jadi tokoh agama, bahkan jadi anggota TNI dan Polri. Siapa yang tahu. Faktanya memang tidak ada data sahih soal berapa jumlah orang keluarga atau simpatisan PKI ini.

Selama ini yang muncul baru sebatas klaim data yang masih harus diverifikasi. Misalnya seperti diungkap Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kivlan Zen yang menyebut telah ada puluhan juta orang Indonesia menjadi pengikut PKI. "Dari informasi, ada 15 juta pengikut dan simpatisan PKI. Kalau dengan anak cucunya bisa 60 juta orang," ujar Kivlan saat dihubungi, Selasa, 18 September 2017 (viva.co.id).

Masalahnya Kivlan tak merinci dari mana asal muasal data itu. Mantan Kepala Staf Kostrad ABRI ini melontarkan angka begitu saja sambil membangun narasi meyakinkan bahwa kini PKI tengah mengumpulkan massa pelan-pelan. "Motifnya ingin berkuasa. Ingin mengubah menjadi negara komunis, menjadi negara diktator, melarang adanya demokrasi dan tidak ada Tuhan," kata Kivlan.

Begitulah, sampai sekarang 'hantu PKI' ini masih tetap dipelihara sebagai isu tahunan. Tapi yang bahaya dari omongan Kivlan--soal jumlah keluarga dan simpatisan PKI--ini ketika dijadikan komoditas politik. Ini benar-benar terjadi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi korbannya. Berulangkali si Bung Kurus itu diserang isu tersebut dari seteru politiknya. Ada dua kasus serangan isu PKI kepada Jokowi yang paling membetot publik: Kasus Tabloid Obor Rakyat dan kasus ujaran kebencian Ustaz Alfian Tanjung.

Kasus Tabloid Obor Rakyat mencuat saat Pilpres 2014. Media partisan yang miring ke kubu Prabowo-Hatta waktu itu menulis artikel yang menuduh Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan PKI. Pemimpin redaksi dan penulis tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyosa sudah dihukum dalam kasus ini. Jokowi sampai berdarah-darah menepis berita hoaks tersebut selama empat tahun.

Pada Mei 2017, giliran Ustaz Alfian Tanjung yang mengorkestrasi isu tersebut. Alfian terbukti melontarkan ujaran kebencian dalam ceramahnya yang diberi judul: "Menghadapi Invasi PKI & PKC" yang disampaikan kepada jamaahnya di Masjid Mujahidin, Jalan Perak Barat, Surabaya. Videonya diunggah di Youtube oleh Mujahidin TV pada 26 Februari 2017 sempat viral di media sosial. Ia lalu ditetapan sebagai tersangka dan ditahan pada waktu itu.

Setahun kemudian, di bulan yang sama, Alfian Tanjung kembali diperkarakan gara-gara cuitannya di Twitter yang menyebut "PDIP 85% isinya kader PKI". Namun kali ini ia divonis lepas oleh pengadilan lantaran masih menjalani hukuman penjara dalam kasus ujaran kebencian tahun sebelumnya. Kasus Alfian di 2018 ini terjadi setahun menjelang Pilpres 2019 dan tepat saat ramainya gerakan tagar #2019GantiPresiden.

Soal cuitannya di Twitter, ternyata Alfian Tanjung memiliki hitungan matematis yang merujuk pada pernyataan kader PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning pada 2002 dalam sebuah acara takshow di Lativi (sekarang tvOne). Penggalan video wawancara Ribka itu sekarang banyak diunggah ke Youtube. Ribka dalam potongan wawancara itu menyatakan ada 15 juta anak-anak eks anggota atau kader PKI, belum cucu dan cicitnya sekitar 20 juta.

Berdasar hasil wawancara Ribka itulah Alfian kemudian menerka-nerka kalau puluhan juta kader PKI tersebut ikut membesarkan atau ikut berpartisipasi ke PDIP. Lalu pada Pemilu 2014 mereka memperoleh suara 23,6 juta saat pemilu. "Itukan menurut logika demografisnya, antara kematian dan angka kelahiran kita tahu lebih banyak angka kelahiran. Lalu dengan adanya rentang waktu dan juga angka dari 20 juta kader PKI dan 23 juta suara, ditemukan angka sekitar 84,6 persen atau kira-kira 85 persen," katanya.

"Kita menangkap gejala invasi komunis internasional. Maka putusan ini kita jelas akan menghadapi gerakan komunis dan PKI dengan cara tidak memilih pemimpin mendukung mereka, 2019 ganti presiden," kata Alfian yang menyebut vonis terhadapnya merupakan titik balik bagi masyarakat Indonesia mendukung pemimpin yang anti-PKI (selain Jokowi) yaitu dengan memilih mengganti presiden dalam Pilpres 2019 (detik.com).

BAGIAN III

Ketika Keluarga Pemberontak PRRI dan Pemberontak PKI Disatukan: Memperkuat Prabowo-Sandi atau Malah Jadi Hantu Menakutkan?

Sudah jadi rahasia umum bahwa Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo adalah anak kandung Soemitro Djojohadikoesoemo, tokoh pemberontak PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang diproklamasikan di Padang pada 15 Februari 1958. Jadi wajar bila dalam barisan pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno juga banyak terdapat keturunan pemberontak PRRI lainnya, baik dari unsur PSI maupun Masyumi.

Untuk memenangkan Pilpres 2019, Hashim Djojohadikusumo (selaku Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN), menyatakan siap menerima dukungan dari semua masyarakat, termasuk dari keturunan PKI. "Bahkan anak dan cucu PKI pun, cicit PKI kami akan terima dukungannya. Saya katakan itu, kita mau menang," kata Hashim seperti dilansir CNN, Minggu, (27/1).

Pernyataan Hashim Djojohadikusumo agak aneh. Kenapa? Sebab, semenjak Pilpres 2014 lalu para pendukung Prabowo gencar mengkampanyekan anti PKI. Bahkan, sampai ada yang menerbitkan tabloid dan buku tentang fitnah-fitnah soal PKI yang ditujukan kepada Jokowi (pesaing Prabowo dalam Pilpres 2014). Artinya, para pendukug Prabowo telah menganggap para keturunan PKI sebagai musuhnya sejak Pilpres 2014 lalu.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; kenapa tiba-tiba Hashim Djojohadikusumo kini ingin merangkul para keturunan PKI untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2019? Kenapa Hashim Djojohadikusumo ingin menyatukan para keturunan PKI dengan para keturunan pemberontak PRRI dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi? Mungkinkah barisan BPN masih loyo hingga Hashim Djojohadikusumo ingin memperkuat barisannya dengan mengumpulkan militansi para keturunan pemberontak PRRI dan keturunan PKI?

Boleh jadi, Hashim Djojohadikusumo memang sudah kehilangan akal karena elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi tak beranjak naik secara signifikan meski kampanye sudah gencar dilaksanakan. Celakanya, elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi justru tergerus oleh blunder-blunder akibat kebohongan atau sandiwara dari Prabowo-Sandi sendiri.

Jangan-jangan, Hashim Djojohadikusumo kini sudah panik hingga ia terpaksa harus berubah sikap 180 derajat, yakni berbalik siap menerima dukungan dari para keturnan PKI. Meski sejak Pilpres 2014 lalu pendukung Prabowo sudah membabi buta memusuhi para keturnan PKI dengan aneka macam meme dan fitnah yang disebar di media sosial maupun tabloid, kini Hashim Djojohadikusumo tanpa malu-malu melempar wajah manis kepada para keturunan PKI.

Dengan kata lain, sejarah rivalitas antara pemberontak PRRI dengan PKI yang telah berlangsuk sejak Orde Lama lalu, juga ingin diterjang Hashim Djojohadikusumo demi meraih kemenangan Pilpres 2019. Melalui cara itulah Hashim Djojohadikusumo sepertinya ingin mengumpulkan kekuatan baru dengan menyatukan para keturunan tokoh PSI dan Masyumi (pendukung pemberontak PRRI) dengan para keturunan PKI.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; mungkinkah langkah Hashim Djojohadikusumo ini akan mampu menarik simpati masyarakat atau malah sebaliknya akan jadi bumerang yang merugikan bagi pasangan Prabowo-Sandi? Jawaban pertanyaan terakhir ini mungkin masih sulit ditebak saat ini.

Yang jelas, sejarah pemberontakan PRRI dan PKI sama-sama telah meninggalkan sejarah yang hitam. Seperti diketahui, dalam catatan sejarah, PKI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang akibat terlibat pemberontakan. Demikian pula, PSI dan Masjumi juga dibubarkanb pemerintah karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI.

Seandainya Hashim Djojohadikusumo berhasil menyatukan keturunan dari para tokoh pemberontakan PRRI dan PKI, bisa jadi akan mendapat pujian dari Prabowo. Namun kalau dampaknya justru membuat para pemilih jadi ketakutan untuk menyumbakan suaranya pada Pilpres 2019 nanti, boleh jadi Hashim Djojohadikusumo akan dilempar telepon seluler oleh Prabowo.

Bukan begitu?

BPN Prabowo-Sandi Akhirnya Jadi Markas Para Pemberontak Lintas Zaman

Sebelum merangkul para keturunan PKI, koalisi pendukung Prabowo-Sandi sudah mesra dengan para pentolan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut Hashim Djojohadikusumo (Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional /BPN), banyak masyarakat yang mempertanyakan mengenai dukungan FPI dan HTI kepada Prabowo-Sandi.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pihaknya tidak meminta dukungan FPI dan HTI, tetapi organisasi itu yang menawarkan dukungan. "Kenapa keluarga saya atau Prabowo kerja sama dengan FPI dan HTI, saya mau jelaskan di sini bukan kami meminta bantuan mereka, mereka menawarkan dukungan kepada kami," terang Hashim seperti dilansir CNN Indonesia.

Pendek kata, bila rencana Hashim Djojohadikusumo menampung dukungan dari para keturunan PKI berhasil terwujud, maka BPN Prabowo-Sandi akan jadi markas berkumpulnya para keturunan pemberontak lintas generasi. Betapa tidak? Selain terdapat keturunan para pemberontak DI/TII, keturunan pemberontak PRRI, dan keturunan pemberontak PKI, dalam BPN Prabowo-Sandi juga terdapat organisasi baru yang intoleran dan anti Pancasila yang sepaham dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Ini Jejak Para Pemberontak Lintas Zaman dan Tanda Kebangkitannya

DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pernah melakukan pemberontakan di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan. Beberapa tokohnya di hukum mati. Tapi tidak seperti keluarga anggota PKI yang dihabisi baik nyawa, kesempatan ekonomi, politik dan sosial. Keluarga pemberontak DI/TII hidup nyaman-nyaman saja. Padahal kelakuannya sama dengan PKI, sama-sama anti-Pancasila. Sama-sama pemberontak. Sama-sama membuat kekacauan. Sama-sama menyusahkan rakyat.

Kebangkitan DI/TII terlihat dari tampilnya pendiri PKS, Hilmi Aminuddin (anak seorang panglima Tentara Islam Indonesia - DI/TII). Anehnya, orang-orang PKS yang paling ngotot menyebut kebangkitan PKI, tapi mereka tidak pernah mau menyebutkan kebangkitan DI/TII. Padahal dosa DI/TII terhadap bangsa ini sama besarnya dengan dosa PKI. Kebangkitan DI/TII ini terasa lebih kental dengan hadirnya HTI dan kelompok gila khilafah lainnya.

Justru ini yang jauh lebih berbahaya ketimbang komunisme. Sebab, komunis memang sudah ambruk. Komunis di Uni Soviet sudah lama hancur. Sedang komunis China sendiri kini sudah ermutasi menjadi kapitalis. Hanya Korea Utara yang tersisa dan kini sudah nyaris ambruk juga.

Yang perlu diwaspadai justru bangkitnya radikalisme semacam Taliban, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, ISIS, Al-Qaidah, Jabhat Nusrah , dan kelompok-kelompok jihadis lainnya yang bermaksud mendirikan negara Islam ideologi dan cara berfikirnya sama dengan DI/TII.

Kebangkitan ideologi DI/TII makin menguat dengan munculnya slogan kampanye Jakarta Bersyariah, yang marak digembar-gemborkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Menjelang Pilpres 2019 ini juga muncul NKRI Bersyariah yang digelorakan oleh Rizieq Shihab (pendukung Prabowo)..

Hal itu diperkuat munculnya fenomena intoleran di berbagai daerah seperti diharamkannya upacara bendera, dilarangnya hormat bendera, semaraknya isu agama dalam pemilu, banyaknya kekerasan atas nama agama.

Dari sini publik bisa bertanya-tanya, jangan-jangan Prabowo-Sandi memang ingin mengganti NKRI dengan sistem yang lain? Wah, alangkah ngerinya jika Prabowo-Sandi berkuasa. Yang jelas, BPN Prabowo-Sandi bakal berubah seperti sarang "HANTU POLITIK" paling menakutkan bila Hashim Djojohadikusumo berhasil mengumpulkan para keturunan PKI, para keturunan pemberontak DI/TII, para keturunan pemberontak PRRI, dan para jihadis yang sepaham dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).